

ABSTRAK

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan kewajiban yang harus diupayakan pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi telah berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara umum, pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi telah berjalan efektif, ditandai dengan adanya beberapa perkara yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai, termasuk permintaan maaf, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, serta penerimaan dari pihak korban. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah ketersediaan dasar hukum yang kuat, partisipasi aktif keluarga korban dan pelaku, komitmen hakim dan aparatur pengadilan, pendekatan yang sesuai dan sensitif terhadap anak, serta niat baik pelaku untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan diversi adalah tindak pidana yang dilakukan berancaman lebih dari 7 tahun, adanya pengulangan tindak pidana, pelaku tidak sesuai dengan ketentuan umur dalam UU SPPA, dan tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

Kata Kunci: Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi

ABSTRACT

Diversion in the juvenile criminal justice system is an obligation that must be pursued at every stage of the legal process, starting from investigations by the police, prosecution by the prosecutor's office, to examinations in court as mandated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of diversion for children in conflict with the law at the Class IA Jambi District Court and to identify and analyze factors that support and hinder the effectiveness of the implementation of diversion at the court level at the Class IA Jambi District Court. The method used in this study is the empirical juridical research method. Data collection in this study was carried out through interviews and document reviews. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of diversion at the Class IA Jambi District Court has been carried out in accordance with the principles of restorative justice as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In general, the implementation of diversion at the Class IA Jambi District Court has been effective, marked by the successful resolution of several cases through peaceful agreements, including apologies, commitments not to repeat the offense, and acceptance from the victim. Supporting factors include the availability of a strong legal basis, active participation of the victim's and perpetrator's families, commitment from judges and court officials, an appropriate and sensitive approach to children, and the perpetrator's good intentions to correct mistakes. Factors hindering the implementation of diversion include crimes that carry a sentence of more than 7 years, repeat offenses, perpetrators not meeting the age requirements stipulated in the Child Protection Act (UU SPPA), and the failure to reach an agreement between the parties.

Kata Kunci: Diversion, Children in Conflict with the Law, Class IA Jambi District Court